

PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP
KUALITAS AUDIT PADA INSPEKTORAT
PROVINSI GORONTALO

SRI WAHYUNI LATABILA

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo

E-mail : sriwahyunilatabila731@gmail.com

ABSTRAK

**SRI WAHYUNI LATABILA, E1116006. PENGARUH
PEMEHAMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS AUDIT
PADA INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Sistem Pengendalian Interen (X1) dan *Good Governance* (X2) Terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo, dengan menggundakan metode survey, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner yang akan di berikan kepada auditor (responden), pada penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 106 dengan teknik

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana di ambil dengan pertimbangan kriteria tertentu, dan di tarik sampel sebesar 56 responden yang berada pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo,

Hasil penelitian menunjukkan pada variabel Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X1) dan Good Governance (X2) Secara *Simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada inspektorat provinsi gorontalo sebesar 1,132. Dan nilai kofisien regresi sebesar 0,079 (07,9%) ada pun sebesar 0,921 atau (92,1%) di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dan Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada inspektorat Provinsi Gorontalo sebesar 0,070 atau (07,0%) dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,264 dan variabel *Good Governance* (X2) secara *parsial* namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan menunjukkan nilai sebesar 0,151 atau (15,1%) dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,141.

Kata Kunci: Pemahaman Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Kualitas Audit

PENDAHULUAN

Pemerintah telah banyak mengelurkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintah tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi. Maka dapat mewujudkan tata kelola penyenggaraan pemerintah yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu system yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan fungsi manajemen berupa pengawasan intern pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, kebijakan maupun ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah di perlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government serta mendukung penyelenggaraan yang efektif, efisien, transparan, manajemen resiko, pengendalian, dan proses governance hingga pada pemberian saran bagi peningkatan nilai atau value organisasi.

Melihat pentingnya peran sistem pengendalian intern pemerintah maka dibutuhkan peran dari seluruh jajaran pemerintah khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku pengawas intern pemerintah. Asosial Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2003) dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia bahwa APIP memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintah/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peran APIP yang efektif. Peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan auditor yang professional dan kompeten dengan hasil audit yang intern yang berkualitas. Jadi auditor yang berkualitas akan menghasilkan audit yang berkualitas pula. Menurut Mardiasmo (2005:2) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Good Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Dalam kondisi ini pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dari pemerintah yang korupsi menjadi pemerintah yang bersih dan transparan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa system dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Keahlian audit dan *Good Governance* sangat membantu keberhasilan dan kualitas kerja seseorang auditor internal dalam melakukan wewenang audit serta pencegahan terjadinya kecurangan penyajian laporan keuangan sehingga terbuka terwujudnya perusahaan yang baik dalam menghasilkan kualitas laporan audit.

Kualitas Audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien terdapat pelanggaran atau masalah yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan

audfitan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik yang relevan (Agusti dan periwi, 2013)

Apapun tanggapan manajemen, auditor wajib mengomunikasikan semua kelemahan pengendalian internal yang signifikan, secara tertulis. Bukanlah peran auditor untuk menentukan apakah biaya perbaikan atas kelemahan pengendalian internal itu, sebanding dengan hasil yang diperoleh. Jika kelemahan pengendalian internal tidak signifikan tidak perlu mengungkapkan temuan ini secara tertulis atau mengulanginya di tahun berjalan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintahan daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan internal auditor.

Hasil obsevasi dan wawancara peneliti dengan beberapa auditor mengungkapkan bahwa ada 542 laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun 2018 termasuk didlamnya Provinsi Gorontalo dalam ikhtisar hasil Pemerintah Semester 1 Tahun 2017 (IHPS I, 2018) mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 411 (76%) LKPD, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 113 (21%) LKPD, dan opini tidak menyatakan pendapat (TMP) atas 18 (3%) LKPD

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukan bahwa kualitas audit inspektoran masih memiliki beberapa kendala, dari berbagai factor yang

mempengaruhi rendahnya kualitas audit Inspektorat Provinsi Gorontalo, menurut pengamatan peneliti yaitu terkait Pemahaman Sistem Pengendalian Intern

Hal ini di dukung oleh penelitian Sulistia (2013), menemukan system pengendalian intern (SPI) klien berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Selanjutnya Penelitian Augustine *et al* (2013) membuktikan konsepsi bahwa sistem pengendalian intern yang efektif dan efisien memiliki pengaruh lebih besar pada kualitas pekerjaan audit, pekerjaan kualitas audit tidak layak tanpa pembentukan sistem pengendalian internal yang bias diterapkan, efisien dan efektif dalam organisasi. Dalam penelitiannya menemukan sistem pengendalian intern yang baik dapat menyebabkan pekerjaan audit yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada auditor Inspektorat Provinsi Gorontalo dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Sistem Pengendalian intern dan Good Governance Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan Good Governance (X_2) secara *simultan* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inseptorat Provinsi Gorontalo.

2. Apakah Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_1) secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inseptorat Provinsi Gorontalo.

Apakah Good Governance (X_2) secara *parsial* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provins

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

Kajian pustaka

Pengertian Pemahaman Sistem Pengendalian Sistem Pengendalian

Istilah sistem suatu yang memiliki bagian-bagian yang saling berinteraksi dan mencapai tujuan tertentu. Menurut Marom (2002: 1) bahwa sistem “suatu dari prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan fungsi pokok dalam suatu badan usaha”. Sedangkan pengertian pemahaman pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Pengendalian juga diartikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, Handoko (2009: 359) pelaksanaan menilai apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Usman (2008:470) Jadi pengendalian ini adalah mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang ditetapkan.

Di Indonesia, Ikatan Akuntansi Publik Indonesia (2011) menegaskan bahwa Pemahaman Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain

untuk memberikan keyakinan memandai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini a) Keandalan pelaporan keuangan. b) Efektifitas dan efisien operasi. c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Bagi perusahaan, istilah internal kontrol atau pemahaman Pengendalian Intern merupakan suatu istilah yang umum dan banyak dipergunakan dalam berbagai kepentingan. Dalam artian pengendalian intern menjelaskan berbagai prosedur yang ditetapkan pemilik atau pimpinan perusahaan perusahaan untuk mengarahkan dan mengawasi bawahannya, sehingga hasil kerja yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik atau pimpinan perusahaan. Pengendalian Intern juga berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*ftound*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang).

Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern yang diciptakan dalam perusahaan haruslah mempunyai tujuan, yakni agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan peraturan, sehingga mampu meminimalisasikan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Menurut Mulyadi, (2016:129-130) bahwa tujuan dari Sistem Pengendalian Intern adalah :

- 1) Menjaga aset organisasi

Struktur pengendalian intern yang baik akan mampu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, pencurian dan kecurangan-kecurangan yang dapat timbul terdapat aktivitas perusahaan.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi

Manajemen mempunyai kepentingan terhadapa informasi keuangan yang diteliti dan yang diandalkan. Informasi akuntansi digunakan oleh manajemen sebagai besar dasar pengembalian keputusan, karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3) Mendorong efisiensi

4) Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha untuk mengurangi penggunaan sumber data yang tidak efisien.

5) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Struktur pengendalian inter dirancang untuk memberikan kayakinan yang memadai bahwa kebijakan serta prosedur yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi, (2016:130-135) untuk menciptakan sistem pengendalian yang baik di dalam perusahaan, maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi :

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokoknya adalah memproduksi dan menjual

produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan dan umum. Departemen-departemen ini kemudian terbagi lebih lanjut menjadi unit-unit organisasi yang lebih kecil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:

- a) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan misalnya pembelian. Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah sungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan.
 - b) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi. Oleh karena itu penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa mengawasi pelaksanaan otoritas. Di pihak lain, formulir merupakan

dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam formulir dicatat dalam akuntansi dengan ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya dokumen pembukaan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Selanjutnya, prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan beban suatu organisasi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah :
 - a) Penggunaan formulir bermotor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Formulir merupakan alat untuk memberikan otoritas terlaksananya transaksi sehingga pengendalian pemakaiannya dengan menggunakan nomor urut tercetak, akan dapat menetapkan pertanggungjawaban terlaksananya transaksi.
 - b) Pemeriksa mendadak (*surprised audit*). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-

kegiatan pokoknya, hal ini akan mendorong karyawan melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

- c) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Karena setiap transaksi yang dilaksanakan dengan campur tangan pihak lain, akan mengakibatkan terjadinya *internal check* terhadap pelaksanaan tugas setiap unit organisasi yang terkait, sehingga mendorong setiap unit organisasi melaksanakan praktik yang sehat dalam pelaksana tugasnya.
- d) Perputaran jabatan (*job rotation*). Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga persekongkolan diantara mereka dapat dihindari.
- e) Keharusan mengambil cuti bagi karyawan yang berhak. Karyawan kunci perusahaan diwajibkan mengambil cuti yang menjadi haknya. Selama cuti, jabatan karyawan yang bersangkutan digantikan sementara tersebut.
- f) Secara periodik diadakan percocokan fisik kekayaan dengan catatannya. Untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan percocokan atau rekonsiliasi antara aset secara fisik dengan catatan akuntansi atas aset tersebut.
- g) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Bagaimana baikan struktur organisasi, sistem otoritas dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik sehat, semuanya tergantung pada manusia yang melaksanakannya. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya berbagai cara berikut ini dapat ditempuh:
- a) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaanya. Untuk memperoleh karyawan yang mempunyai kecekapan sesuai dengan tuntutan tanggung jawab yang akan dipikulnya, manajemen harus mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut.
 - b) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya.

Good Governance

Menurut Bank Dunia dalam Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar efisien, penghidaran salah olokasi dan investasi yang langkah dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *Administrative*, menjalakan disiplin anggaran serta penciptaan legal framewok bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan Good Governance sebagai hubungan masyarakat.

Good Governance sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga pemerintah sentral yang menjadi *Agent Of Change* dari suatu masyarakat berkembang/developing di dalam Negara berkembang. *Agent of change* karena perubahan yang dikehendakinya, menjadi planned change (perubahan yang berencana), maka tersebut juga *Agent Of Development*. Agengen Of Development diartikan sebagai pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program, proyek-proyek, dan peran perencanaan dalam anggaran.

Konsep *Good Governance* memiliki arti yang luas dan dipahami secara berbeda tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, *Good Governance* diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang memberikan ruang partisipasi pada masyarakat atau dengan kata lain adanya pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara negara dalam arti luas, masyarakat dan dunia usaha (Batubara dalam Adelia, 2015: 42)

Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, *Good Governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses suatu tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial polik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut atas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitasi (World Conference in Governance dalam Sedarmayanti, 2001:2)

Prinsip-prinsip Good Governance

Kunci utama memahami *Good Governance* yaitu pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance*. Prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nation Development Program*

(UNTDP) dalam Mardismo (2004:24) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan Good Governance, meliputi:

1. Partisipasi (*Partisipation*)

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan Good Governance, sejalan dengan pandangan baru yang berkembang sebagai warga negara yang memiliki negara dan sekaligus pemerintahan yang ada di dalamnya (*owner*).

2. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadila dan dipatuhi secara utuh tanpa pandang bulu.

3. Transparansi (*Transparansi*)

Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Persoalan sifat-sifatnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan perzekcokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya.

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

5. Visi Strategis (*Strategis Vision*)

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

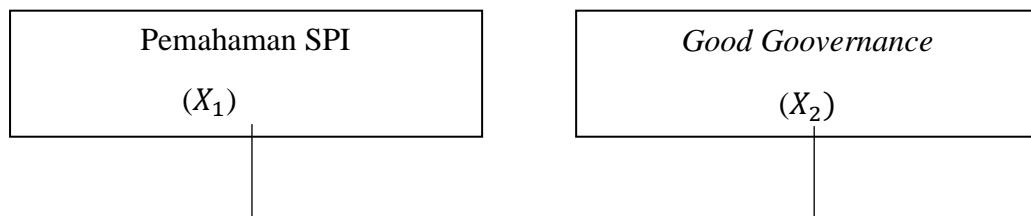
Kualitas Audit

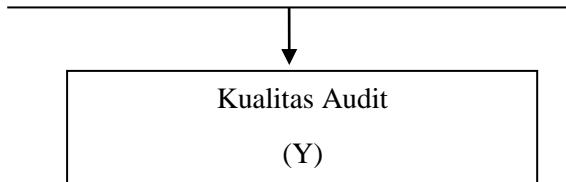
Suatu pemeriksaan memiliki nilai karena kemampuan menyediakan jaminan (*assurance*) secara independen atas kredibilitas informasi akuntansi yang memperbaiki pengalokasian sumberdaya dan peningkatan efisien (Zhang *et al.* 2016:275). Secara umum, auditor sektor publik meliputi satu atau tiga jenis audit yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Akan tetapi semua audit sektor publik berawal dari tujuan memberikan konstribusi terhadap tata kelola yang baik (*good governance*) dengan (a) menyediakan informasi independen, objektif, dapat diandalkan dan kesimpulan atau opini ditetapkan berdasarkan bukti yang cukup dan tepat berkaitan dengan entitas publik: (b) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mendorong perbaikan, dan kepercayaan berkelanjutan atas ketepatan pemakaian dana dan asset serta kinerja administrasi publik: (c) mendorong efektivitas unit yang menjalankan fungsi pemantauan dan koreksi atas pemerintahan, dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dananya bersumber dari publik (d) menciptakan insentif perubahan dengan pengetahuan, analisis kprensif dan rekomendasi yang kuat untuk perbaikan (INTOSAI dalam ISSAI 100:7)

Akuntansi publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002:47) ada 7 prinsip yang harus dipatuhi akuntansi publik sebagai berikut.

1. Tanggung jawab profesi. Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2. Kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Integritas. Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin..
4. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.
5. Perilaku Profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauh tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
6. Standar Teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Kerangka Pemikiran





Hipotesis

1. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan *Good Governance* (X_2) secara *simultan* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.
2. Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_1) secara *persial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. *Good Governance* (X_2) berpengaruh positif dan signifikan secara *persial* terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Obyek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (X_1) dan *Good Governance* (X_2) Terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo

Metode Penelitian

Metode yang digunakan

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan metode *Survey*. Menurut Riduwan (2014:49) penelitian survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang di ambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kajadian-kejadian relative, distribusi dan hubungan antara variabel sosiologis maupun psikologis.

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menganalisis data dengan alat statistik dalam bentuk angka-angka

Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pemahaman SPI (X_1) Widjaja (2002:38)	1. Lingkungan Pengendalian	a. Integritas dan nilai etis b. Komitmen dan kompetensi c. Kebijakan dan praktis sumber daya manusia d. Pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab e. Filosofi manajemen dan gaya operasi f. Struktur organisasi	Interval
	2. Penaksiran Resiko	a. Identifikasi resiko. Mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko. b. Analisis resiko.	
	3. Kegiatan Pengendalian	a. Kegiatan pokok instansi pemerintah b. Hubungan dengan proses resiko	
	4. Informasi dan Komunikasi	c. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis a. Menyediakan b. Mengelola, mengembangkan.	
	5. Pemantauan	a. Penilaian kualitas kinerja b. struktur pengendalian internal sepanjang waktu	
	1. Partisipasi	Partisipasi dasar kebebasan berasosiasi dalam mewujudkan <i>good</i>	Interval

<i>Good Governance</i> (X ₂) Madiasmo (2004;24)	2. Aturan hukum 3. Transparansi 4. Akuntabilitas 5. Visi strategi	<i>geovernance</i> Keterangan aturan hukum dan perundan-undangan Transparansi harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Pertanggung jawab kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi misi.
Kualitas Audit (Y) Simamora (2002:47)	1. Tanggung jawab profesi 2. Kepentingan Publik 3. Integritas 4. Kompetensi dan kehatihan professional 5. Perilaku Profesional 6. Standar teknis	Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan professional. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab professional nya dengan integritas setinggi mungkin. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar professional.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2013:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan Sekaran (2006:121) menjelaskan bahwa populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang kejadian, atau hal ini minat yang ingin di investigasi. Pengertian populasi menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa populasi adalah apa yang diteliti oleh

peneliti dengan melakukan investigasi dan dipelajari kemudian di tarik kesimpulan.

Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penetuan sampel dengan pertimbangan tertentu (2012:68). Sampel peneliti yang di gunakan dalam penelitian ini adalah auditor yang terlibat dalam pemeriksaan rutin yang berbeda pada Inspektorat Provinsi Gorontalo, maka sampel penelitian ini adalah yang termasuk dalam golongan Auditor terampil yang berjumlah 56 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Validasi

Sub Variabel	Indikator	r hitung	Nilai Sig	Standar Nilai Sig	Ket KET

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (X1)	X1.1	380	0,007	0,05	VALID
	X1.2	298	0,035	0,05	VALID
	X1.3	330	0,019	0,05	VALID
	X1.4	291	0,040	0,05	VALID
	X1.5	327	0,020	0,05	VALID
	X1.6	328	0,020	0,05	VALID
	X1.7	330	0,019	0,05	VALID
	X1.8	292	0,039	0,05	VALID
	X1.9	365	0,009	0,05	VALID
	X1.10	261	0,050	0,05	VALID
	X1.11	177	0,002	0,05	VALID
	X1.12	188	0,001	0,05	VALID
	X1.13	100	0,005	0,05	VALID
	X1.14	339	0,016	0,05	VALID
	X1.15	278	0,050	0,05	VALID
	X1.16	428	0,002	0,05	VALID
	X1.17	400	0,004	0,05	VALID
	X1.18	152	0,003	0,05	VALID
	X1.19	87	0,001	0,05	VALID

Sub Variabel	Indikator	r hitung	Nilai Sig	Standar Nilai Sig	KET

<i>GOOD GOVERNANCE (X2)</i>	X2.1	0,259	0,003	0,05	VALID
	X2.2	0,381	0,006	0,05	VALID
	X2.3	0,768	0,000	0,05	VALID
	X2.4	0,621	0,000	0,05	VALID
	X2.5	0,620	0,000	0,05	VALID

Sub Variabel	Indikator	r Hitung	Nilai Sig	Standar Nilai Sig	KET
KUALITAS AUDIT (Y)	Y.1	0,206	0,003	0,05	VALID
	Y.2	0,312	0,027	0,05	VALID
	Y.3	0,628	0,000	0,05	VALID
	Y.4	0,645	0,000	0,05	VALID
	Y.5	0,231	0,107	0,05	VALID
	Y.6	0,513	0,000	0,05	VALID

Uji Reabilitas

Sub Variabel	Nilai Alpha Cronbach	Alpha Cronbach	Ket
Sistem Pengendalian Intern (X1)	0,812	0,6	Reliabel
<i>Good Governance</i> (X2)	0,837	0,6	Reliabel
Kualitas Audit (Y)	0,888	0,6	Reliabel

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas dari tiap item pernyataan variabel bebas maupun yang variabel terikat yang di dapatkan dari pengolahan data di SPSS berada di atas nilai Cronbach Alfa (0,6) yang berarti bahwa semua item pernyataan tersebut reliable.

Uji Asumsi Klasik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual	
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32204453
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.055
	Negative	-.093
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

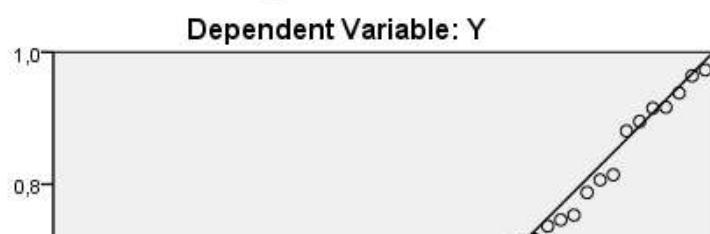
b. Calculated from data.

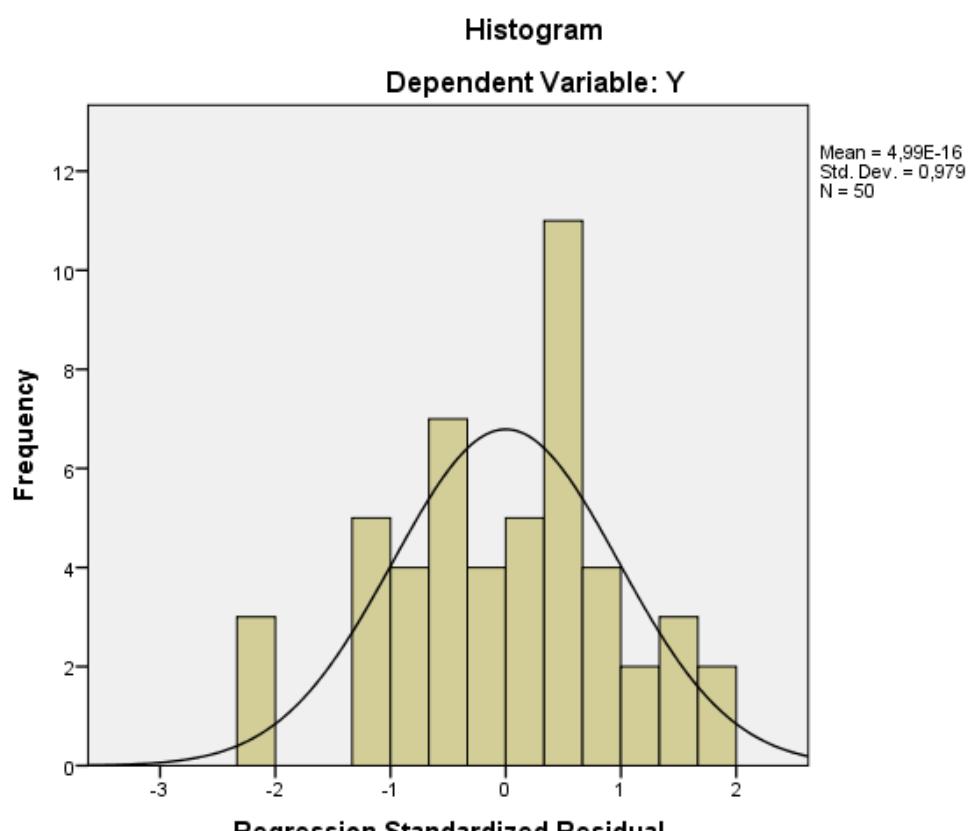
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

a. Hasil Uji Normalitas dengan Analisis grafik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Pengaruh Pemahaman Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Good Governance terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern (X1) dan *Good Governance* (X2) secara *simultan* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Sistem Pengendalian Intern (X1) secara *parsial* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

2. *Good Governance* (X2) secara *Parsial* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kualitas Audit (Y) pada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

Saran

1. Bagi Pihak Inspektorat dapat lebih meningkatkan penilaian Pemahaman Sitem Pengendalian Intern (SPI) (X1) dan *Good Governance* (X2). Karena telah dilihat bahwa dalam penjelasan di atas kedua faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas audit yang di hasilkan.
2. Untuk peneliti selanjutnya, kiranya dapat meneliti variable lain atau faktor lain yang ikut mempengaruhi kualitas audit dan lebih bagus dapat meneliti pada Inspektorat yang berada di daerah lainnya agar hasil penelitian tentang peningkatan kualitas audit dapat di generalisasikan.

REFERENSI

1. Jurnal zhar Susanto., 2017, Sistem Informasi Akuntansi – Pemahaman Konsep Secara Terpadu, Edisi Perdana, Cetakan pertama, Bandung: Lingga Jaya A.Hall, James, 2017, Sistem Informasi Akuntansi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta. Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Buku Riduwan. (2018). Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian. (H. Husdarta, Ed.) Bandung: Alfabeta. Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat.